

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan, dapat disimpulkan bahwa meskipun keberadaan bank sampah telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran lingkungan, efektivitasnya dalam menekan laju pertumbuhan volume sampah masih belum optimal. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa sebagian besar sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan masih berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang tanpa melalui proses pemilahan yang memadai, sehingga kebijakan bank sampah belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan utama terkait pengurangan volume sampah di tingkat sumber. Lebih jauh, ditemukan adanya kesenjangan antara target pengurangan sampah yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan daerah maupun nasional, khususnya Rencana Induk Pengelolaan Sampah 2023–2042 yang menargetkan konsep *zero waste to landfill* pada tahun 2040, dengan capaian realisasi di lapangan yang masih relatif rendah. Kesenjangan ini menandakan bahwa implementasi kebijakan bank sampah belum berjalan seiring dengan perencanaan strategis yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi persoalan minimnya inovasi produk daur ulang, di mana mayoritas kegiatan bank sampah hanya berhenti pada tahap pemilahan dan

penjualan kembali sampah anorganik ke pengepul tanpa upaya yang signifikan untuk mengembangkan produk turunan bernilai tambah. Kondisi ini menghambat transformasi bank sampah sebagai pusat inovasi dan penggerak ekonomi sirkular di tingkat lokal, karena produk olahan yang ada sering kali kurang diminati pasar akibat desain yang monoton, kualitas yang rendah, serta daya saing harga yang terbatas.

Dengan demikian, meskipun program bank sampah di Kecamatan Pedurungan telah berhasil membangun partisipasi masyarakat dan menunjukkan penerimaan sosial yang cukup luas, efektivitasnya sebagai instrumen kebijakan lingkungan masih menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah, antara lain berupa peningkatan dukungan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas pengelola, perluasan sosialisasi dan edukasi lingkungan, serta dukungan pendanaan yang lebih memadai dari pemerintah. Selain itu, upaya pengembangan inovasi produk daur ulang yang bernilai ekonomis dan berdaya saing perlu ditingkatkan agar bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemilahan, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pengelola bank sampah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memperkuat peran bank sampah sebagai bagian integral dari strategi pengurangan sampah jangka panjang di Kota Semarang. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Pedurungan dapat berkontribusi lebih nyata terhadap pencapaian target pengelolaan sampah yang

efektif sekaligus mendukung visi Kota Semarang menuju *zero waste to landfill* pada tahun 2040.

4.1.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Tujuan program yang jelas menjadi faktor utama pendukung implementasi. Bank sampah di Kecamatan Pedurungan memiliki sasaran spesifik, yaitu mengurangi volume sampah rumah tangga, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kejelasan sasaran ini memudahkan warga memahami apa yang diharapkan dari mereka, sekaligus membantu pihak pengelola dalam merancang kegiatan dan evaluasi capaian program. Dengan adanya standar yang jelas, pelaksanaan program lebih terarah dan dapat diukur keberhasilannya.

2) Sikap Komitmen & Implementor

Partisipasi aktif warga dan dukungan tokoh masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan. Motivasi warga untuk menyetorkan sampah dan mengikuti kegiatan bank sampah, didukung oleh kesadaran akan manfaat lingkungan maupun ekonomi, membuat program berjalan lebih efektif. Komitmen yang tinggi dari pihak implementor di lapangan, baik warga maupun fasilitator, turut memastikan bahwa proses pemilahan dan pengelolaan bank sampah dilakukan sesuai prosedur. Sikap positif

ini menciptakan iklim kolaboratif yang mendukung kelancaran program.

3) Lingkungan Sosial & Ekonomi

Lingkungan sosial yang mendukung, termasuk adanya norma sosial positif dan motivasi ekonomi, menjadi faktor pendukung penting. Partisipasi masyarakat didorong oleh kesadaran sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan dan insentif ekonomi dari penjualan sampah anorganik. Kondisi sosial-ekonomi yang mendukung ini memungkinkan warga lebih termotivasi untuk aktif dalam pengelolaan bank sampah, sehingga keberlanjutan program lebih terjamin dan tujuan pengelolaan bank sampah dapat tercapai secara optimal.

4.1.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Pedurungan

1) Sumber Daya

Keterbatasan tenaga pengelola, fasilitas, dan fluktuasi harga barang daur ulang menjadi kendala teknis yang signifikan. Warga kadang enggan menyetorkan sampah karena nilai jual yang tidak stabil, sedangkan kekurangan tenaga atau fasilitas menghambat kelancaran operasional bank sampah. Hal ini membuat pelaksanaan program belum optimal meski kesadaran masyarakat meningkat.

2) Komunikasi antar Organisasi

Hambatan komunikasi dan koordinasi antar pihak dapat menimbulkan miskonsepsi. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik membuat sebagian warga kurang memahami prosedur, manfaat, dan tujuan bank sampah. Hal ini menurunkan tingkat partisipasi dan memengaruhi konsistensi pelaksanaan program.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil analisis informasi yang diperoleh dari wawancara, masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan. Maka dari itu, demi mencapai keberhasilan implementasi perlu dilakukan aksi atau kegiatan berupa:

1) **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

Mengadakan program sosialisasi rutin mengenai tujuan dan manfaat bank sampah, termasuk pelatihan tentang pemilahan sampah, agar seluruh warga memahami peran mereka dan terdorong untuk berpartisipasi aktif.

2) **Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya**

Menambah fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan sampah, timbangan, dan peralatan pemilahan, serta meningkatkan jumlah tenaga pengelola agar operasional bank sampah berjalan lebih lancar dan efisien.

3) **Peningkatan Insentif Ekonomi dan Motivasi Warga**

Menyediakan sistem insentif yang lebih menarik bagi warga, misalnya harga jual sampah yang kompetitif atau program penghargaan bagi warga yang konsisten berpartisipasi, untuk meningkatkan motivasi partisipasi.

4) Perbaikan Komunikasi dan Koordinasi Antar Pihak

Memperkuat mekanisme koordinasi antara warga, RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan DLH, sehingga informasi terkait prosedur, target, dan capaian program tersampaikan dengan jelas dan mengurangi miskonsepsi.

5) Penguatan Kesadaran Lingkungan dan Partisipasi Sosial

Mengadakan kegiatan kampanye kebersihan, lomba lingkungan bersih, atau kegiatan komunitas yang melibatkan seluruh warga untuk membangun budaya sadar lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

6) Pengembangan Inovasi Produk Daur Ulang

Mendorong pengelola bank sampah untuk tidak hanya berhenti pada pemilahan dan penjualan sampah anorganik, tetapi juga mengembangkan produk daur ulang yang bernilai tambah, seperti kerajinan kreatif, produk rumah tangga ramah lingkungan, atau material bangunan alternatif. Inovasi ini perlu didukung dengan pelatihan keterampilan, pendampingan dari akademisi atau praktisi, serta akses ke pasar agar produk memiliki daya saing dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi sirkular di masyarakat.